

# Mengurai Subsidi BBM dari Sejarahnya

Oleh: Hendra Kurniawan

BEBERAPA hari terakhir pekan lalu masyarakat kebanyakan, termasuk penulis, harus merasakan antre untuk mendapatkan premium bersubsidi. Jika biasanya hanya mengantre lima sampai tujuh kendaraan di depan, kali ini luar biasa karena antrean membeludak sampai ke jalanan hingga sepanjang beberapa puluh meter dari mesin pompa. Meskipun mengantre, toh masih dapat bersyukur daripada harus kehabisan premium. Penulis juga ikut menjadi pengantre di tengah-tengah kerumunan orang dengan kendaraannya masing-masing. Barangkali itu sisi positif dari kelangkaan premium bersubsidi akhir-akhir ini, latihan mengantre secara tertib selain juga menambah kenalan baru dari sesama pengantre!

Situasi kelangkaan premium bersubsidi yang kita rasakan saat ini sebenarnya bersumber pada persoalan subsidi itu sendiri. Subsidi BBM mulai muncul pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada awal tahun 1970-an, Presiden Soeharto merasa perlu untuk menggelontorkan dana APBN untuk subsidi BBM. Alasannya karena saat itu daya beli masyarakat rendah dan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil. Pada tahun-tahun tersebut cadangan minyak bumi Indonesia juga masih berlimpah dan cukup untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor.

Pendapatan dari sektor pajak pada masa awal pemerintahan Soeharto belum signifikan. Ketika itu aturan soal perpajakan belum teratur sekarang ditambah lagi kesadaran masyarakat membayar pajak yang masih sangat rendah. Tak heran apabila hasil minyak mentah Indonesia menjadi penopang utama sumber pendapatan negara. Subsidi BBM saat itu tidak menjadi persoalan yang membebani APBN. Rakyat saat itu benar-benar terbantu dengan transportasi yang murah dan harga barang-barang kebutuhan pokok yang relatif stabil karena biaya untuk distribusi pasokan juga tidak tinggi.

Tak dapat dipungkiri bahwa produksi minyak menjadi persoalan tersendiri. Indonesia mengalami kesulitan soal produksi sehingga harus mendatangkan ahli dari luar. Indonesia akhirnya menjadi negara pengekspor minyak mentah bagi dunia. Pertambahan jumlah penduduk dunia dan menipisnya cadangan minyak bumi membuat harga minyak dunia terus meningkat. Di Indonesia sendiri juga terjadi ledakan penduduk disertai dengan ledakan jumlah kendaraan bermotor. Kemajuan zaman dan kebutuhan yang terus meningkat menjadi keuntungan bagi para produsen kendaraan

bermotor untuk semakin gencar memasarkan produknya. Kemudahan kredit hingga rendahnya uang muka semakin mendorong bertambahnya kepemilikan sepeda motor maupun mobil.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berakibat pada konsumsi bahan bakar terutama premium dan solar yang terus melonjak dengan cepat. Hampir setiap rumah tangga, termasuk mereka yang berpendapatan rendah, dapat dipastikan memiliki sepeda motor paling tidak satu hingga dua unit. Bahkan kalau perlu setiap anggota keluarga dalam satu rumah memiliki sepeda motor sendiri-sendiri. Belum lagi keluarga yang berpendapatan di atas rata-rata, tidak hanya sepeda motor saja, mereka juga memilih mobil sebagai alat transportasi yang harus dimiliki. Kenyataan ini tidak lepas dari kegagalan pemerintah menyediakan sarana transportasi umum yang layak, nyaman, dan aman. Kendaraan pribadi dinilai jauh lebih memberi kenyamanan dan tidak membuang waktu.

Meledaknya jumlah kendaraan tentu semakin membutuhkan konsumsi BBM dalam jumlah besar. Saat produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali mengimpor BBM. Ini harus dibarengi de-

ngan mengurangi subsidi atau bahkan dihapus agar tidak semakin mengalami defisit APBN. Subsidi BBM juga lambat laun menjadi tidak tepat sasaran karena pemilik kendaraan kebanyakan adalah kalangan menengah ke atas. Dengan demikian justru orang-orang mampulah yang lebih menikmati subsidi BBM. Hal ini normal premium tanpa subsidi berkisar pada Rp 10.500,- ini artinya dengan harga saat ini, pemerintah menggelontorkan subsidi sebesar Rp 4.000,- untuk setiap liter premium. Artinya tidak sedikit subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya.

Niat Jokowi, presiden terpilih dalam pemerintahan mendatang yang akan menghapus subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor lain patut didukung. Pemerintah memang harus berani mengambil kebijakan demi menyelamatkan rakyat sekiranya pun tidak populer. Subsidi BBM dapat dimanfaatkan untuk sektor lain yang lebih mendasar dan mengemuka seperti pendidikan dan kesehatan. Situasi sekarang sudah jauh berbeda dengan di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lepas dari soal hitung-menghitung keuntungan, bagaimanapun subsidi BBM sudah tidak lagi relevan. \*\*\*

**Hendra Kurniawan MPd, DSc**  
Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta